DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin, Zainal Asikin 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haris Herdiansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers Persada.

Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta. Grasindo.

Zainudin Ali. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

Andi Junaidi. 2016. *Kajian Tentang Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Menjadi Warga Negara Yang Baik.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Rofi Wahanisa, Nurul Fibrianti. 2013. *Penyadaran Masyarakat Atas Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Guung Pati Kota Semarang.* Malang: Universitas Brawijaya

Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono. 2013. *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor*

Industri Pariwisata Di Kota Baru. Jurnal Admnistrasi Publik(JAP). Malang : Universitas Brawijaya.

C. KAMUS

Pusat Bahasa Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Negara Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

Peraturan Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat No 28/PRT/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pendelagasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Padang Nomor 16 A Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

E. INTERNET

https://indonesia.go.id/kependudukan/sosial/prosedur-pengurusan-imb. diakses pada tanggal 12 Desember 2020. pukul 20.00 WIB

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma. diakses pada tanggal 19 Januari 2021. pukul 21.00 WIB

https://langgam.id/kecamatan-pauh-kota-padang/. diakses pada tanggal 6 November 2020. pukul 14.00 WIB.

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2340/imb/, diakses pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 22.00 WIB.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA